



PERJANJIAN KINERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU
TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Kesatu,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74,45%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	- Persentase penurunan pelanggaran perda/Perkada - Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	11,11 % 11,11 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sesbesar **Rp. 7.952.095.501 ,-**
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 5.612.124.399,-**

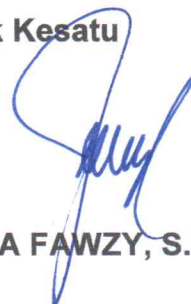
Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Kesatu



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan 1

Sasaran : MENINGKATNYA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah standar pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum gangguan ketenteraman dan ketertiban umum .Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan standar pelayanan minimal, sebagai urusan wajib Pelayanan Dasar SPM bidang Ketenteraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum	Semakin tinggi tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang Ketenteraman dan ketertiban umum maka akan akan semakin meningkat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	$\% = \frac{a+b+c+d}{4} \times 100\%$ dimana a : persentase SDM aparatur terlatih b : persentase Sarana dan Prasarana sesuai standar c : persentase SOP yang dipenuhi d : persentase warga Negara yang memperoleh pelayanan dampak akibat dari penegakan hukum penegakan perda/Perkada dengan asumsi masing-masing indikator di beri bobot 25%	Bidang Pengembangan SDM dan Sarana Prasaran Satpol PP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	74,45 %	Bila berdasarkan renstra, target yang ditetapkan Tahun 2024 untuk indikator ini sebesar 70 % namun target yang telah dicapai Tahun 2023 telah mencapai 72,45 % sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Persentase SDM terlatih Tahun 2023 mencapai 52,22 % 2. Persentase sarana & prasarana mencapai 37,58% 3. Persentase SOP yang dipenuhi mencapai 100% 4. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/perkada mencapai 100%

		Sehingga bila semua indikator tersebut dijumlahkan angkanya dan dikali 25% adalah 72,45 % dengan pertimbangan tahun 2024 poin 1 dan 2 ada kenaikan masing-masing 1% sehingga ditetapkan target 74,45 %
--	--	--

Penjelasan 2

Sasaran : MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG SESUAI STANDAR

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur..Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat,

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum akan tercermin dari menurunnya pelanggaran perda/perkada dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	$\% = (a-b) : a \times 100\%$ dimana a : jumlah pelanggaran Perda/Perkada tahun 2023 b : Jumlah Pelanggaran perda/prkada tahun 2024	Bidang Penegakan Peraturan Daerah
2	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		$\% = (a-b) : a \times 100\%$ dimana a : jumlah gangguan trantibum tahun 2023 b : Jumlah gangguan trantibum tahun 2024	Bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	11,11 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra, hal ini juga sejalan dengan tren positif dalam 3 tahun terakhir dimana peningkatan angka penurunan cenderung tidak pernah melebihi target yang telah ditetapkan dalam renstra.

Penjelasan 3

Sasaran : MENINGKATNYA KUALITAS PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima..Dasar

hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Sakip	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah tercermin dari Nilai sakip yang di dapatkan	Berdasarkan hasil evaluasi inspektorat kab Luwu Timur	- Inspektorat Kab. Luwu Timur - Sekretariat Satpol PP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	75,50 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra, hal ini juga sejalan dengan tren positif dalam 3 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. SALMAN, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT SATPOL PP
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	- Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.612.124.399	APBD
KEGIATAN		
1) Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 138.097.000	APBD
SUB KEGIATAN		
1 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 61.711.200	APBD
2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp 5.469.000	APBD
3 Koordinasi Dan penyusunan DPA-SKPD	Rp 7.591.000	APBD
4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 63.325.800	APBD
KEGIATAN		
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.449.165.349	APBD
SUB KEGIATAN		
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.346.246.749	APBD
2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp 36.960.000	APBD
3 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 36.365.400	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 29.593.200	APBD
KEGIATAN		
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 30.713.700	APBD
SUB KEGIATAN		
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 30.713.700	APBD
KEGIATAN		
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 179.834.400	APBD
SUB KEGIATAN		
1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 7.506.650	APBD
2 Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Rp 20.640.000	APBD
3 sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Rp 3.927.750	APBD
4 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 147.760.000	APBD

KEGIATAN

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	413.312.150	APBD
---------------------------------------	----	-------------	------

SUB KEGIATAN

1 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	7.215.600	APBD
2 penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	10.178.000	APBD
3 penyediaan bahan logistik kantor	Rp	6.012.500	APBD
4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	11.475.000	APBD
5 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7.800.000	APBD
6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	8.250.000	APBD
7 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	362.381.050	APBD

KEGIATAN

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	101.235.000	APBD
---	----	-------------	------

SUB KEGIATAN

1 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	101.235.000	APBD
---	----	-------------	------

KEGIATAN

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	93.657.800	APBD
---	----	------------	------

SUB KEGIATAN

1 Penyediaan jasa Surat Menyurat	Rp	6.174.800	APBD
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp	72.483.000	APBD
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	15.000.000	APBD

KEGIATAN

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	206.109.000	APBD
--	----	-------------	------

SUB KEGIATAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	15.100.000	APBD
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp	120.900.000	APBD
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	38.990.000	
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	16.720.000	APBD
5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	14.399.000	APBD

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
INDRA FAWZY, S.I.P., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

SEKRETARIS SATPOL PP
MUH. SALMAN, S.STP., M.Si.

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pelayanan dalam bentuk aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, dan mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor serta tata usaha yang tertib dan baik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Apabila penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar maka pelayanan administrasi perkantoran dapat terpenuhi	Jumlah capaian penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar di bagi jumlah seluruh penunjang urusan perangkat daerah dikali 100%	Sekretariat Satpol PP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASNIAR, S.Sos.**

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi
Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **MUH. SALMAN, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,

HASNIAR, S.Sos.

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 persen
2	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 persen

SEKRETARIS SATPOL PP



MUH. SALMAN, S.STP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN



HASNIAR, S. Sos

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA TEPAT WAKTU

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja,Rencana Kerja anggaran, Rencana Kerja Anggaran perubahan,dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran perubahan, Laporan kinerja Bulanan,triwulanan dan Tahunan, LKPJ dan laporan evaluasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tercermin dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja waktu	Jumlah capaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dikali 100%	Sub bagian perencanaan dan keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 2

Sasaran : TERSELENGGARANYA ADMINISTRASI KEUANGAN DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama sehingga sistem keuangan bisa teratur dan baik

.Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase administrasi keuangan terselenggara dengan baik	Semakin tinggi capaian persentase administrasi keuangan maka administarsi keuangan akan terselenggara dengan baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi keuangan dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi keuangan di kali 100%	Sub bagian perencanaan dan keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra dan tren yang di tunjukkan selama 3 tahun terakhir positif dan stabil di angka 100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SABIA, SE.**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **MUH. SALMAN, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,

SABIA, SE.

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Terwujudnya administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah yang berkualitas	- Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen
2)	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	- Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen
3)	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	- Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen
4)	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai standar	persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
5)	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Daerah dengan baik	- Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen
6)	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	80 Persen

SEKRETARIS SATPOL PP



MUH. SALMAN, S.STP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**



SABIA, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan 1

Sasaran : TERWUJUDNYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dasar hukum yaitu peraturan menteri dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang Milik Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Administrasi Barang milik Daerah pada perangkat daerah	semakin tinggi capaian persentase barang milik daerah yang diadministrasi maka akan terwujud adminsitasi barang milik daerah yang berkualitas	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi barang milik daerah dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan barang milik daerah yang diadminsitasi dikali 100%	Pengurus barang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 2

Sasaran : TERLAKSANANYA ADMINSITASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi perangkat daerah	semakin tinggi capaian persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian maka akan terlaksana administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi kepegawaian dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 3

asaran : TERLAKSANANYA ADMINISITASI UMUM PERANGKAT DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kerumahtangaan,logistic,penyelenggaraan koordinasi,bahan bacaan dan penggandaan .

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	semakin tinggi persentase capaian kinerja administrasi umum maka akan terlaksana administrasi umum perangkat daerah yang baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi umum dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 4

asasan : TERSEDINYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI STANDAR

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan jasa surat menyurat, Jasa komunikasi ,listrik dan sumber daya air,jasa pelayanan umum kantor

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	semakin tinggi persentase capaian kinerja jasa penunjang urusan perangkat daerah maka akan tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai standar	Jumlah capaian dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dibagi jumlah seluruh dokumen /laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 5

asasan : TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan dan operasional, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan gedung kantor,pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan daerah tercermin dari indikator kinerja	Jumlah capaian pemeliharaan barang milik daerah dibagi jumlah seluruh pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang dipelihara sesuai target dikali 100%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 6

asaran : TERSEDIANYA BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi	Tersedianya BMD penunjang urusan Pemerintah daerah tercermin dari BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi	Jumlah unit BMD yang diadakan dibagi jumlah unit BMD yang diadakan sesuai target dikali 80%	Sub bagian umum dan kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	80%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IBRAHIM YAKUB,S.Hut**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,

IBRAHIM YAKUB,S.Hut

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertanganinya Pelanggaran Perda dan Perkada	- Persentase Perda/perkada yang ditegakkan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 378.548.401	APBD
KEGIATAN		APBD
1 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 378.548.401	APBD
SUB KEGIATAN		APBD
1) Sosialisasi Penegakan peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 135.590.640	APBD
2) Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Rp 129.231.900	APBD
3) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 113.725.861	APBD

**KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH**

IBRAHIM YAKUB, S.Hut

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan 1

Sasaran : TERTANGANINYA PELANGGARAN PERDA/PERKADA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penanganan semua laporan dan temuan pelanggaran perda/perkada baik secara yustisi maupun non yustisi. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase perda/perkada yang ditegakkan	Tertanganinya pelanggaran perda/perkada tercermin dari persentase perda/perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/perkada yang ditegakkan dibagi jumlah perda/perkada yang memuat sanksi	Bidang Penegakan Perda

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan penegakan perda bila semua pelanggaran perda/perkada dapat ditangani/ditindaklanjuti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAULUS PEA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Perda Satuan
Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **IBRAHIM YAKUB, S.Hut**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IBRAHIM YAKUB, S.Hut

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,

PAULUS PEA, S.Sos.

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Perda dan perkara	- persentase penegakan perda	100 Persen

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH**


IBRAHIM YAKUB,S.Hut

Malili, 2 Januari 2024

**KEPALA SEKSI PENINDAKAN
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**


PAULUS PRIANTO ENDOLEKU,S.Sos

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : MENINGKATNYA PENANGANAN PERDA DAN PERKADA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penanganan semua laporan dan temuan pelanggaran perda/perkada baik secara yustisi maupun non yustisi. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan keteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase penegakan perda	Meningkatnya penanganan perda/perkada dapat terukur dari persentase penegakan perda	Jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani/ditindaklanjuti di bagi jumlah laporan pelanggaran perda/perkada	Seksi penindakan pelanggaran perda

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan penegakan perda bila semua pelanggaran perda/perkada dapat ditangani/ditindaklanjuti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NIRHATI, SE.**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **IBRAHIM YAKUB,S.Hut**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IBRAHIM YAKUB,S.Hut

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,

NIRHATI, SE.

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan - perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	26 Laporan
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang - dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	56 Laporan

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH**


IBRAHIM YAKUB, S.Hut

Malili, 2 Januari 2024

**KEPALA SEKSI PEMBINAAN
PENGAWASAN DAN PENYULUHAN**


NIRHATI, SE

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : TERLAKSANANYA SOSIALISASI DAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/pelaku usaha	Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan perda dan perbup dapat tergambar dari laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan	Cukup jelas	Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
2	Jumlah laporan pengawasan atas kepatuhan		Cukup jelas	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	26 laporan	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . angka 26 diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi yyang dilakukan 26 titik dalam seluruh wilayah kecamatan di kab. Luwu timur dalam setahun dan masing-masing titik tersebut dibuatkan laporan hasil pelaksanaan sosialisasinya
2	56 Laporan	target tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra, angka 56 diperoleh dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan sebanyak 56 kali di 56 titik di seluruh kecamatan dalam wilayah kab. Luwu Timur dan amsing-masing dari titik lokasi pengawasan menghasilkan 1 (satu)laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NI KADEK RINHA WATY, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

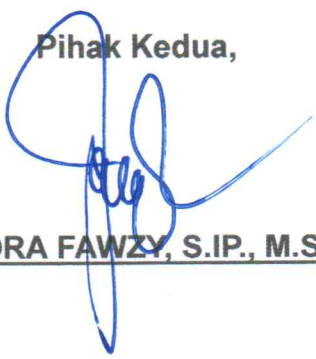
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,


NI KADEK RINHA WATY, SE

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenterman dan ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh - Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100,00%

PROGRAM

1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

ANGGARAN

Rp 549.244.050

KETERANGAN

APBD

KEGIATAN

1) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Rp 549.244.050

APBD

SUB KEGIATAN

1 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

Rp 324.054.500

APBD

2 Kejasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rp 20.568.000

APBD

3 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Rp 10.294.000

APBD

4 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rp 95.125.000

APBD

5 Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Rp 15.160.000

APBD

6 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Rp 84.042.550

APBD

Malili, 2 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

NI KADEK RINHA WATY, SE

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : TERPENUHINYA STANDAR TEKNIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR SPM BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum untuk peningkatan pelayanan kepada warga Negara yang memperoleh dampak akibat penegakan hukum perda/perkada. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, pada urusan bidang trantibumlinmas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/perkada	Terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Trantibum akan tercermin dari warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat dari penegakan hukum perda/perkada.semakin tinggi persentase tersebut semakin baik pelayanan SPM yang diberikan kepada masyarakat.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/perkada di bagi jumlah warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan hukum perda/perkada	Bidang SDM dan Sarana prasarana

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga sampai dengan Tahun ini belum ditemukan warga negara yang terkena dampak akibat penegakan hukum perda/perkada



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AL MUNIR IDRIS, SH**

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDA dan
Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **NI KADEK RINHA WATY, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NI KADEK RINHA WATY, SE

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,


AL MUNIR IDRIS, SH

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJASAMA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Meningkatnya Kapasitas SDM aparaturn Satpol PP	- Persentase SDM aparaturn Terlatih	78,82 Persen
2	Meningkatnya Kompetensi PPNS	- Persentase PPNS yang berkompoten	100 persen

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
DAN SARANA PRASARANA**


NI KADEK RINHA WATY, SE

Malili, 2 Januari 2024

**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS SDA DAN KERJASAMA**


AL MUNIR IDRIS , SH

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJASAMA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : MENINGKATNYA KAPASITAS SDM APARATUR TERLATIH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan SDM aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan , workshop ataupun bimbingan teknis. Dasar hukum yaitu Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase SDM aparatur terlatih	Tersedianya SDM yang berkompeten akan tercermin dalam persentase SDM aparatur terlatih,semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak SDM yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kompetensinya	Jumlah Aparatur satpol PP yang telah mengikuti peningkatan kapasitas di bagi jumlah seluruh personil Satpol PP di kali 100%	seksi pengembangan kapasitas dan kerjasama

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	78,82%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir , dan angka yang ditetapkan merupakan analisis rencana pengiriman jumlah peserta diklat yang akan diikuti dimana telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Penjelasan 2

Sasaran : MENINGKATNYA KOMPETENSI PPNS

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kompetensi PPNS melalui diklat lanjutan bagi PPNS ataupun bimbingan teknis lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas PPNS. Dasar hukum yaitu Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase PPNS berkompeten	Meningkatnya kompetensi PPNS akan tercermin dari jumlah PPNS yang berkompeten dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada	jumlah PPNS aktif yang menyelesaikan kasus pelanggaran perda/perkada dibagi jumlah PNS Satpol yang telah mengikuti Diklat PPNS	seksi pengembangan kapasitas dan kerjasama

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . angka tersebut diperoleh data PPNS Satpol PP yang ada dimana setiap tahun melakukan perpanjangan SKEP sebagai PPNS dan aktif melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAHMUDDIN, S.AN**

Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi
Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **NI KADEK RINHA WATY, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

NI KADEK RINHA WATY, SE

MAHMUDDIN, S.AN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA, DATA DAN INFORMASI
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Sarana dan Parasarana Trantibum	- Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum minimal	55,2 Persen

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
DAN SARANA PRASARANA**


NI KADEK RINHA WATY, SE

Malili, 2 Januari 2024

**KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA,
DATA DAN INFORMASI**


MAHMUDDIN, S. AN

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI SARANA PRASARANA, DATA DAN INFORMASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemenuhan sarana dan prasarana trantibum Dasar hukum yaitu Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase sarana dan prasarana trantibum minimal	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana yang memadai akan tercermin dalam sarana dan prasarana yang tersedia. Semakin besar besar jumlahnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa satpol PP memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien	Jumlah sarana prasarana yang tersedia dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar di kali 100%	seksi Sarana prasarana, data dan informasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	55,20%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir , dan angka yang ditetapkan sudah disesuaikan dengan kemampuan anggaran dalam pengadaan sarana prasarana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

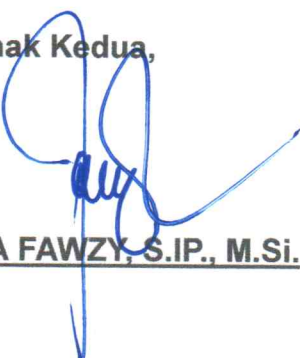
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YASRUDDIN,S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

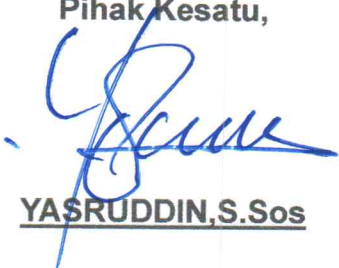
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kesatu,


YASRUDDIN,S.Sos

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	100%

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum

Rp 7.024.303.050

APBD

KEGIATAN

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rp 7.024.303.050

APBD

SUB KEGIATAN

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota

Rp 61.689.800

APBD

- 2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

Rp 83.546.750

APBD

- 3) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan

Rp 6.778.879.200

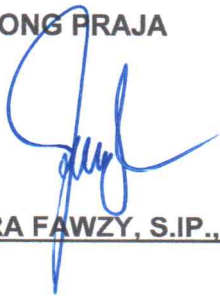
APBD

- 4) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Rp 100.187.300

APBD

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Malili, 2 Januari 2024

KEPALA BIDANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT


YASRUDDIN, S.Sos

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : TERTANGANINYA GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik melalui pencegahan maupun melalui penindakan/penertiban. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akan tercermin dalam gangguan trantibum yang dapat diselesaikan. Semakin efektif pemerintah daerah dalam menangani gangguan-gangguan tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi penurunan jumlah pelanggaran. Dengan kata lain, adanya tindakan yang tepat untuk menangani gangguan akan mengakibatkan penurunan jumlah pelanggaran, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan/ditindaklanjuti diibagi jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan di kali 100%	Bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan bidang ini adalah bila semua gangguan trantibum yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti/ditangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARBI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi
Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **YASRUDDIN, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

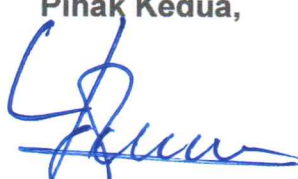
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

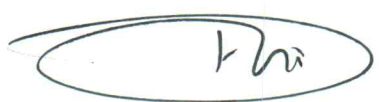
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,


YASRUDDIN, S.Sos

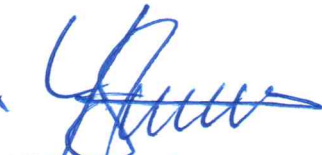
Pihak Kesatu,


HARBI, S.Sos

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertanganinya Pelanggaran K3, Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen

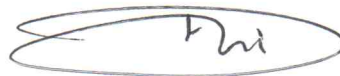
KEPALA BIDANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



YASRUDDIN, S. Sos

Malili, 2 Januari 2024

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN,
OPERASI DAN PENGENDALIAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM



HARBI, S. Sos

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan 1

Sasaran : TERTANGANINYA PELANGGARAN K3, UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban dan keindahan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli wilayah, pengamanan asset, pengamanan kegiatan masyarakat dan pengawalan serta operasi penertiban. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase tertib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Tertanganinya pelanggaran K3, unjuk rasa dan kerusuhan massa tercermin dari tertib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan K3, unjuk rasa, dan kerusuhan massa yang ditindaklanjuti dibagi jumlah gangguan K3, unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaporkan di kali 100%	Seksi pencegahan operasi dan pengendalian ketertiban umum

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan diharapkan semua gangguan baik yang ditemukan maupun yang dilaporkan semua dapat ditindaklanjuti/diselesaikan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAIFUL SUDDING, SH**

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **YASRUDDIN,S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

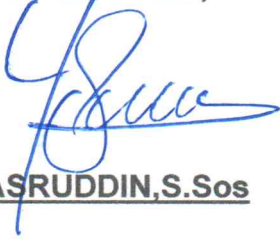
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,


YASRUDDIN,S.Sos

Pihak Kesatu,


SAIFUL SUDDING, SH

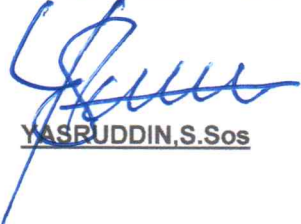
**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

TABEL KINERJA

TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Peranan Satlinmas Desa/Kelurahan	Persentase Satlinmas Desa/ Kelurahan yang Aktif	49,97 Persen

KEPALA BIDANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT


YASRUDDIN, S. Sos

Malili, 2 Januari 2024

KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT


SAIFUL SUDDING, SH

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan 1

Sasaran : MENINGKATNYA PERANAN SATLINMAS DESA/KELURAHAN

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan peran aktif Satlinmas desa/kelurahan dalam penanganan gangguan dan ketertiban umum. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Satlinmas Desa/kelurahan yang aktif	Meningkatnya peranan satlinmas Desa/kelurahan akan tergambar dari jumlah satlinmas desa/kelurahan yang aktif	Jumlah Satlinmas desa/kelurahan yang diberdayakan dibagi jumlah desa/kelurahan	Seksi perlindungan masyarakat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	49,97%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . angka ini di peroleh dari adanya peningkatan jumlah desa/kelurahan yang satlinmasnya diberdayakan trus meningkat setiap tahun dari tahun 2021 s.d 2023 yaitu target tahun lalu 25,78 bila tahun ini ditargetkan 26 desa diberdayakan maka target 49,97% bisa didapatkan.